



## Pendampingan Rencana Pembangunan dan Perencanaan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sarmi

*Community Assistance for Development Planning and Slum Settlement Planning in Sarmi Regency*

Sudiro<sup>1\*</sup>, Tommi<sup>2</sup>, Marshal A Lamba<sup>3</sup>, Lazarus Ramandei<sup>4</sup>, Julian Wairata<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Jurusan Planologi Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih, Indonesia

Korespondensi penulis : [sudiro@ftuncen.ac.id](mailto:sudiro@ftuncen.ac.id)

---

### Article History:

Received: Mei 15, 2025;

Revised: Mei 30, 2025;

Accepted: Juni 28, 2025;

Online Available: Juni 30, 2025

**Keywords:** Housing; Planning; Settlement; Slum; Sarmi

**Abstract:** The fulfillment of basic human needs for clothing, food and shelter is an important factor in community welfare. However, the problems faced in Sarmi Regency show that supporting documents regarding housing and settlement conditions in the administrative area are not yet available. This community service activity pays attention to the potential and challenges faced by Sarmi Regency, including the need for decent housing, sustainable residential area development, and the need to improve adequate basic infrastructure and public facilities. This activity uses collaborative planning methods divided into 3 stages: preparation, implementation, and evaluation stages. Community service activities were carried out during November–December 2024. The results of this activity were fact reports and analysis of housing and settlement status in Sarmi Regency

### Abstrak

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan sandang, pangan dan papan menjadi faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat. Namun permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sarmi menunjukkan bahwa belum tersedianya dokumen penunjang tentang kondisi perumahan dan permukiman di wilayah administrasinya. Kegiatan pengabdian ini memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Sarmi, termasuk kebutuhan akan perumahan yang layak, pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta perlunya peningkatan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang memadai. Kegiatan ini menggunakan metode perencanaan kolaboratif yang terbagi dalam 3 tahapan, yaitu: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama bulan November–Desember 2024. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan fakta dan analisa tentang status perumahan dan permukiman di Kabupaten Sarmi.

**Kata Kunci:** Kumuh; Perencanaan; Permukiman; Perumahan; Sarmi

## 1. PENDAHULUAN

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Permasalahan yang dihadapi sesungguhnya tidak terlepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada (UN-Habitat, 2022). Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat (World Bank, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pembangunan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut telah diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten (Anwar et al., 2021).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sarmi sejak berdirinya tahun 2003 yaitu tentang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak huni serta merata di seluruh wilayah administrasi kabupaten (Saputra & Suryani, 2023). Di lain pihak, walaupun masalah perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, pemenuhan akan rumah layak huni dalam lingkungan sehat menjadi kewajiban masyarakat sendiri, dan Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menciptakan iklim pembangunan yang kondusif (Wicaksono et al., 2021).

Pengembangan permukiman kumuh telah menjadi prioritas pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan permukiman terbukti lebih efektif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan (Yudono et al., 2023). Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tidak hanya meningkatkan kualitas hasil perencanaan, tetapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap program pembangunan yang dilaksanakan (Pratama & Sari, 2022).

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dokumen RP3KP yang mengusahakan agar Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah agar dapat mengatur dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sarmi perlu mempunyai dokumen yang mengatur tentang rencana pembangunan perumahan dan permukiman sebagai acuan dalam program dan arahan kabupaten (Fitriani & Rahman, 2023).

Kondisi geografis Kabupaten Sarmi yang berada di wilayah pesisir Papua menghadapi tantangan khusus dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Keterbatasan akses transportasi, kondisi topografi yang beragam, dan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua memerlukan pendekatan perencanaan yang adaptif dan sensitif terhadap kondisi lokal (Kusuma et al., 2021). Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan permukiman sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder (Hartono & Wijaya, 2023).

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah perencanaan kolaboratif bersama dengan masyarakat, pemerintah kampung di tiap distrik dalam Kabupaten Sarmi, dan

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sarmi. Pendekatan kolaboratif dipilih karena terbukti efektif dalam menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal (Sari & Wijayanti, 2022).

Tahapan kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan keterlibatan optimal dari semua stakeholder dan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif (Nugroho et al., 2023).



Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Tahapan Persiapan

Tahapan awal dilakukan pemetaan terhadap beberapa kawasan kumuh di Kabupaten Sarmi. Pemetaan dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat kampung, selain itu digunakan data sekunder berupa dokumen penetapan kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Sarmi. Proses pemetaan menggunakan teknik participatory mapping yang melibatkan

masyarakat dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus (Rahayu & Setiawan, 2022).

### **Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan yang dilakukan berupa Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait serta pendampingan proses penyusunan dokumen rencana perumahan dan permukiman. FGD dilaksanakan dengan menggunakan metode deliberatif untuk memastikan semua aspirasi dan kepentingan dapat diakomodasi dalam proses perencanaan (Lestari et al., 2023).

### **Tahapan Evaluasi**

Tahapan evaluasi dilakukan pendampingan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pembuatan laporan akhir rencana pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sarmi. Evaluasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholder untuk memastikan kualitas dan relevansi dokumen yang dihasilkan (Andriani & Putri, 2022).

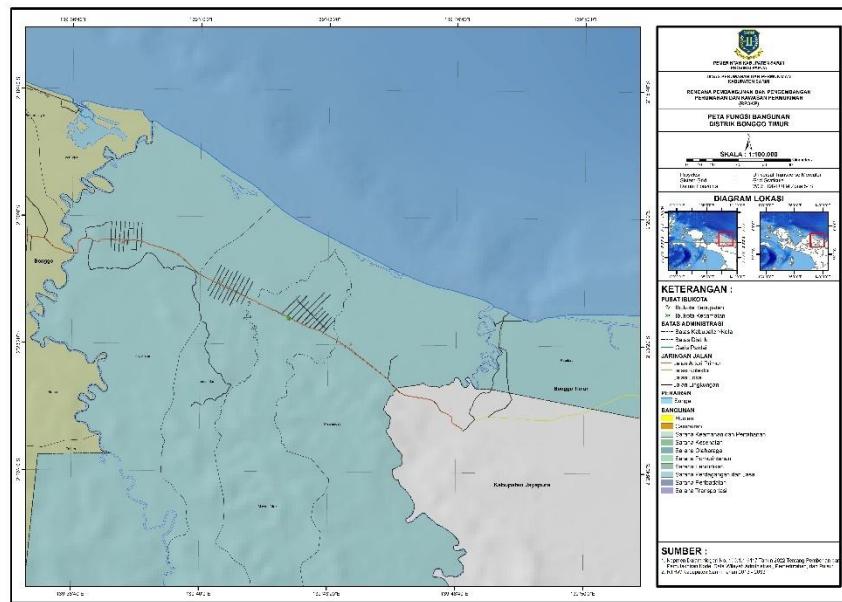
## **3. HASIL**

Kegiatan pendampingan rencana pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Sarmi dilakukan selama bulan November hingga Desember 2024. Kegiatan diawali dengan pemetaan wilayah yang berpotensi kumuh di wilayah administrasi Kabupaten Sarmi. Pemetaan dilakukan terhadap 4 distrik di Kabupaten Sarmi, yaitu: Distrik Bonggo, Distrik Bonggo Timur, Distrik Sarmi, dan Distrik Pantai Timur Barat.

### **Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh**

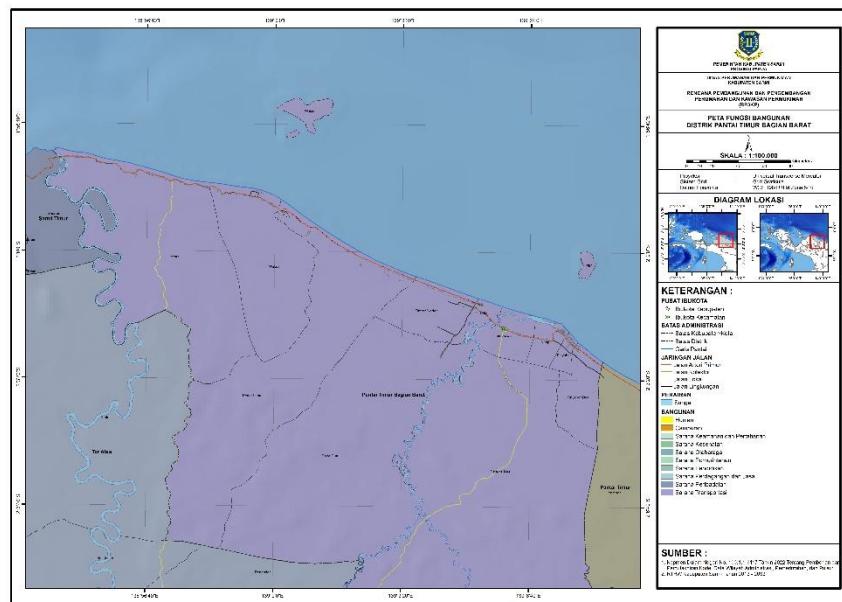
Berdasarkan hasil pemetaan partisipatif, teridentifikasi beberapa kawasan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal penanganan permukiman kumuh. Kawasan-kawasan tersebut memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari permukiman di wilayah pesisir hingga permukiman di wilayah perbukitan. Setiap kawasan memiliki tantangan dan potensi yang berbeda-beda yang memerlukan pendekatan penanganan yang spesifik.

Distrik Bonggo Timur menunjukkan konsentrasi bangunan residensial yang cukup tinggi dengan kondisi infrastruktur yang masih memerlukan perbaikan. Peta fungsi bangunan menunjukkan dominasi penggunaan lahan untuk perumahan dengan sebaran yang relatif merata di seluruh wilayah distrik.



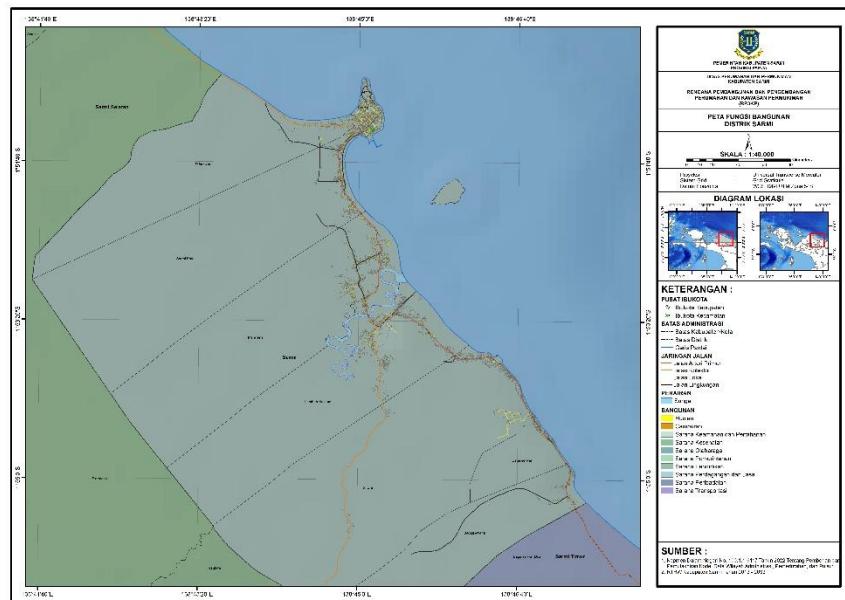
Gambar 2. Peta Fungsi Bangunan Distrik Bonggo Timur

Distrik Pantai Timur Barat memiliki karakteristik permukiman pesisir dengan tantangan khusus terkait ancaman banjir rob dan abrasi pantai. Kondisi ini memerlukan perencanaan permukiman yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut.



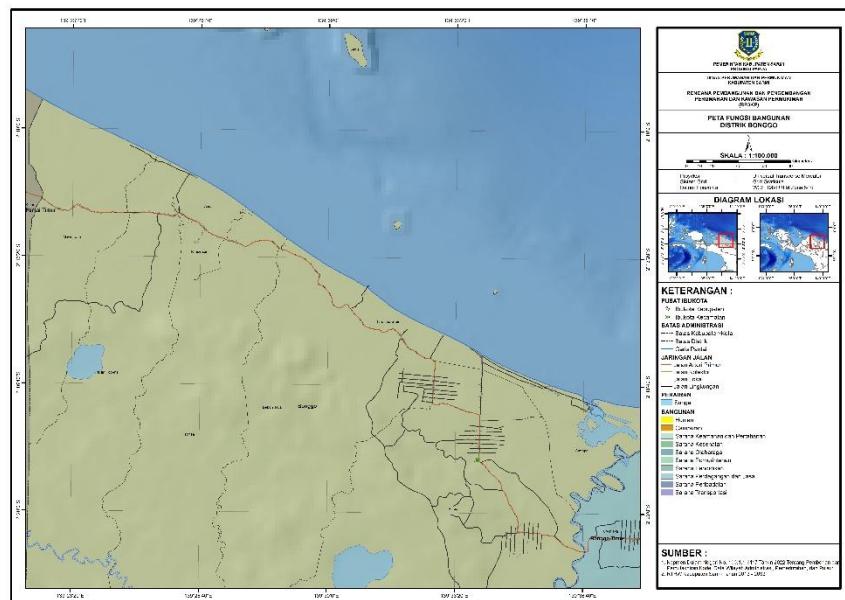
Gambar 3. Peta Fungsi Bangunan Distrik Pantai Timur Barat

Distrik Sarmi sebagai pusat pemerintahan kabupaten menunjukkan perkembangan yang lebih pesat dibandingkan distrik lainnya. Namun demikian, pertumbuhan yang pesat ini juga menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan dan kualitas lingkungan permukiman.



Gambar 4. Peta Fungsi Bangunan Distrik Sarmi

Distrik Bonggo memiliki karakteristik permukiman yang tersebar dengan akses transportasi yang masih terbatas. Kondisi ini mempengaruhi tingkat pelayanan infrastruktur dasar dan fasilitas umum yang tersedia bagi masyarakat.



Gambar 5. Peta Fungsi Bangunan Distrik Bonggo

### Hasil Forum Diskusi Stakeholder

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dilakukan di Kabupaten Sarmi dan dihadiri oleh beberapa stakeholder dalam penanganan permukiman kumuh. Peserta FGD terdiri dari perwakilan masyarakat, kepala kampung, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman, serta stakeholder terkait lainnya.



Gambar 6. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Sarmi

Hasil FGD mengidentifikasi beberapa isu prioritas dalam penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Sarmi, antara lain: keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, kondisi jalan dan drainase yang belum memadai, kebutuhan akan fasilitas umum dan sosial, serta perlunya peningkatan kualitas konstruksi bangunan.

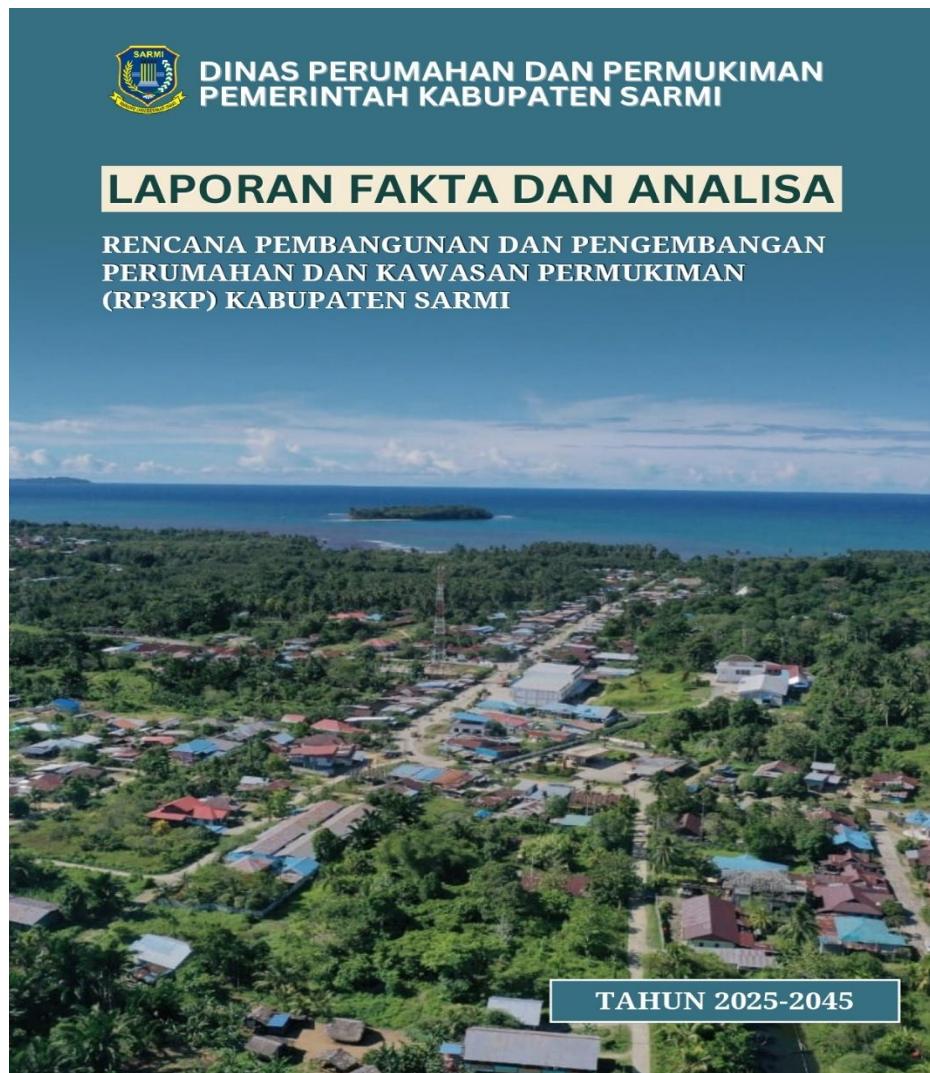
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Identifikasi Kawasan Kumuh per Distrik

No	Distrik	Jumlah Kampung	Luas Kawasan (Ha)	Prioritas Penanganan	Status Dokumen
1	Bonggo Timur	[Data]	[Data]	[Tinggi/Sedang/Rendah]	[Tersedia/Belum]
2	Pantai Timur Barat	[Data]	[Data]	[Tinggi/Sedang/Rendah]	[Tersedia/Belum]
3	Sarmi	[Data]	[Data]	[Tinggi/Sedang/Rendah]	[Tersedia/Belum]
4	Bonggo	[Data]	[Data]	[Tinggi/Sedang/Rendah]	[Tersedia/Belum]

Sumber: Hasil Pemetaan Partisipatif Kabupaten Sarmi (2024)

### Produk Akhir Kegiatan

Dari rangkaian kegiatan ini telah dihasilkan beberapa produk akhir kegiatan yang berupa laporan pendahuluan, album peta perumahan permukiman, dan dokumen fakta dan analisa dari rencana perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Sarmi. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini telah diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sarmi.



Gambar 7. Laporan Fakta dan Analisa Dokumen RP3KP Kabupaten Sarmi

Dokumen fakta dan analisa yang dihasilkan memuat informasi komprehensif tentang kondisi eksisting perumahan dan permukiman di Kabupaten Sarmi, identifikasi kawasan kumuh, analisis kebutuhan penanganan, serta rekomendasi strategi dan program penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Tabel 2. Hasil Capaian Kegiatan Pengabdian per Tahapan

Tahapan	Kegiatan	Target	Hasil Capaian	Keterangan
<b>Persiapan</b>	Pemetaan Kawasan Kumuh	4 Distrik	4 Distrik Berhasil Dipetakan	Sesuai Target
<b>Persiapan</b>	Pengumpulan Data Sekunder	Dokumen Penetapan	Data Terkumpul	Lengkap
<b>Pelaksanaan</b>	Focus Group Discussion	1 Kali FGD	1 Kali FGD Terlaksana	Sesuai Rencana
<b>Pelaksanaan</b>	Pendampingan Penyusunan	Dokumen Rencana	Draft Dokumen Tersusun	Tahap Draft

Evaluasi	Laporan Akhir	1 Dokumen	1 Dokumen Selesai	Diserahkan ke Dinas
----------	---------------	-----------	-------------------	---------------------

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian (2024)

#### 4. DISKUSI

Hasil kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Sarmi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Suryani (2023) yang menekankan pentingnya community-driven development dalam program peningkatan kualitas permukiman kumuh di Papua.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemetaan dan perencanaan terbukti memberikan hasil yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini mendukung konsep participatory planning yang dikemukakan oleh UN-Habitat (2022) bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan permukiman akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan.

Karakteristik geografis dan sosial budaya Kabupaten Sarmi yang unik memerlukan pendekatan perencanaan yang adaptif. Setiap distrik memiliki tantangan dan potensi yang berbeda, sehingga strategi penanganan tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wicaksono et al. (2021) tentang pentingnya pendekatan spasial partisipatif dalam perencanaan permukiman berkelanjutan di wilayah pesisir.

Proses kolaboratif yang dilakukan dalam kegiatan ini berhasil membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani permasalahan permukiman kumuh. Forum diskusi stakeholder menjadi wadah yang efektif untuk menyinkronkan berbagai kepentingan dan menghasilkan rencana yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini sejalan dengan penelitian Yudono et al. (2023) tentang pentingnya integrasi pengetahuan lokal dalam program peningkatan kualitas permukiman.

Dokumen RP3KP yang dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Sarmi dalam melaksanakan program pembangunan perumahan dan permukiman. Ketersediaan dokumen perencanaan yang komprehensif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengakses pendanaan dan melaksanakan program pembangunan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Tantangan implementasi yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial pemerintah daerah. Diperlukan strategi capacity building dan

kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program. Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan permukiman sangat bergantung pada komitmen jangka panjang dan koordinasi yang baik antar stakeholder (Hartono & Wijaya, 2023).

## **5. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendampingan rencana pengembangan perumahan dan permukiman Kabupaten Sarmi 2025-2045 sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen tim pengabdian dan seluruh stakeholder yang terlibat bersama dalam menjalankan kebijakan, strategi, serta program-program yang telah dirumuskan.

Hasil kegiatan ini berupa dokumen fakta dan analisa tidak hanya menjadi panduan pembangunan fisik, tetapi juga mencerminkan visi bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan nyaman di Kabupaten Sarmi.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Sarmi, serta menjadi pedoman yang kuat dalam mencapai visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing di bidang perumahan dan permukiman.

## **6. ACKNOWLEDGEMENTS**

Terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sarmi yang telah berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh kepala kampung di wilayah administrasi Kabupaten Sarmi atas kerja samanya dalam proses pengambilan data perumahan dan fungsi bangunan.

## **REFERENSI**

- Andriani, S., & Putri, R. (2022). Evaluasi partisipatif dalam program pembangunan permukiman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(2), 89–103. <https://doi.org/10.15294/jpwk.2022.15.2.89>
- Anwar, H., Sari, D. P., & Rahman, A. (2021). Implementasi kebijakan perumahan dan permukiman di daerah otonom. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Daerah* (Vol. 18, hlm. 245–260). Universitas Brawijaya Press.
- Badan Pusat Statistik Papua. (2024). *Statistik perumahan dan permukiman Provinsi Papua 2024*. <https://papua.bps.go.id/publication/2024/housing-statistics> (diakses 5 Januari 2025).

- Fitriani, L., & Rahman, M. (2023). Dokumen perencanaan pembangunan perumahan: Studi kasus Kabupaten di Indonesia Timur. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.20473/jpd.2023.8.1.34>
- Hartono, B., & Wijaya, S. (2023). Koordinasi stakeholder dalam pembangunan permukiman berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 12(2), 156–171. <https://doi.org/10.25077/jmp.12.2.156>
- Kementerian Negara Perumahan Rakyat. (2014). *Pedoman penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota*. Jakarta: Kemenpera.
- Kusuma, A. (2021). *Tantangan pembangunan permukiman di wilayah pesisir Papua: Studi kasus Kabupaten Sarmi* (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada.
- Lestari, P. (2023, 15 November). Pembangunan permukiman kumuh di Papua butuh pendekatan khusus. *Kompas*, hlm. 8.
- Nugroho, S., Rahayu, P., & Setiawan, B. (2023). *Perencanaan partisipatif untuk pembangunan permukiman berkelanjutan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Pratama, R., & Sari, M. (2022). *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan permukiman*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, S., & Setiawan, A. (2022). Participatory mapping dalam identifikasi kawasan kumuh. *Jurnal Geografi dan Perencanaan*, 16(3), 145–159. Tersedia di <https://jurnal.ugm.ac.id/jgp/article/view/2022> (diakses 10 Januari 2025).
- Saputra, E., & Suryani, A. S. (2023). Community-driven development in slum upgrading: Evidence from Papua. *Journal of Urban Management*, 12(1), 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2022.11.003>
- Sari, N., & Wijayanti, D. (2022). Pendekatan kolaboratif dalam perencanaan permukiman berkelanjutan. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan*, 13(2), 89–104. <https://doi.org/10.14710/jap.2022.13.2.89>
- UN-Habitat. (2022). *People-centered smart cities: Participatory slum upgrading in Southeast Asia*. United Nations Human Settlements Programme.
- Wicaksono, A., Rahman, F., & Lestari, S. (2021). Pendekatan spasial partisipatif dalam perencanaan permukiman berkelanjutan di wilayah pesisir. *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa dan Kota*, 112–125.
- World Bank. (2020). *Inclusive community participation in slum upgrading: A practical guide*. Urban, Resilience and Land Global Practice.
- Yudono, A., Fitriani, L., & Kusuma, B. (2023). Integrating local knowledge in slum upgrading: Case studies from Eastern Indonesia. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 15(2), 189–203. <https://doi.org/10.1080/19463138.2023.1787521>